

## ABSTRAK

Nama : DEWI AYU LISTIASARI  
NIM : 2013.04015  
Program Studi : Hukum Bisnis Internasional  
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGALIHAN SAHAM YANG TERBEBANI OLEH GADAI**  
(Studi Kasus: Putusan MA Perkara PK No. 240 PK/Pdt/2006)

Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini ada 2 (dua), yakni: Mengapa putusan hakim PN dan PK dalam Perkara Gadai saham antara PT Arya Teguharta (APT) dan PT BFI Finance Indonesia Tbk berbeda; dan Bagaimanakah pengalihan gadai sahamdilihat dari aspek peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum gadai dan hukum perjanjian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, sedangkan dari sifat penelitian ini tergolong kepada penelitian deskriptif analitis dimana memuat gambaran terhadap psetiap masalah pokok sekaligus dilakukan analisa secara terperinci terhadap setiap permasalahan. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perbedaan putusan hakim PN dan PK dalam perkara gadai saham antara PT Arya Teguharta (APT) dan PT BFI Finance Indonesia Tbk, dilatarbelakangi oleh cara pandang setiap hakim terhadap perkara perjanjian gadai saham tersebut. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya No. 123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 April 2004 dan pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali No. 240PK/PDT/2006, keduanya sama-sama berpendapat bahwa perjanjian gadai saham adalah perjanjian dengan suatu ketetapan waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1268 KUHPerdata, dan Majelis Hakim menilai perjanjian gadai saham antara PT Arya Teguharta dan PT BFI Finance Indonesia Tbk gugur, dan kemudian memerintahkan PT BFI Finance Tbk serta Direksinya mengembalikan saham pada PT Arya Teguharta. Karenanya seluruh bentuk pengalihan saham-saham APT yang dilakukan tanpa persetujuan PT Arya Teguharta yang timbul setelah 1 Desember 2000 menjadi tidak sah sebab dasar pengalihan saham tersebut jelas tunduk kepada syarat-syarat dalam perjanjian gadai. Putusan MA No. 240PK/PDT/2006 yang intinya memutuskan pengalihan saham APT oleh PT BFI Finance Indonesia pada Februari 2001 adalah cacat hukum dan bertentangan dengan hukum dapat dikatakan adalah putusan yang sudah benar menurut hukum.

Kata Kunci: Perjanjian Gadai Saham

## ABSTRACT

Name	: DEWI AYU LISTIASARI
NIM	: 2013.04015
Study Program	: International Business Law
Thesis Title	<b>: JURIDICAL ANALYSIS OF TRANSFER OF SHARES BURDENED BY LINE</b> (Case Study: Supreme Court Decision on Case No. PK 240 PK / Pdt / 2006)

The principal issues raised in this study there are two (2), namely: Why PN and PK judge's ruling in Case Pledge of shares between PT Arya Teguharta (APT) and PT BFI Finance Indonesia Tbk different;and How is the transfer of pledge of shares from the aspects of the legislation related to the lien law and contract law. This research is a normative legal research, while the nature of this study pertained to a descriptive analytical research which contains an overview of the main issues at the same time any detailed analysis for any problems. The results of this study can be seen that the difference PN and PK judge's ruling in the case of pledge of shares between PT Arya Teguharta (APT) and PT BFI Finance Indonesia Tbk, dilator background by the perspective of any judge of the court of the stock pledge agreement.As the consideration of the judges in the Central Jakarta District Court decision No.123 / Pdt.G / 2003 / PN.Jkt.Pst, April 14, 2004 and consideration of the Panel of Judges An overview Back No.240PK / PDT / 2006, both were found covenant pledge of shares is an agreement with a determination of time, as stipulated in Article 1268 of the Civil Code, and the judges the agreement pledge of shares between PT Arya Teguharta and PT BFI Finance Indonesia Tbk fall, and then ordered PT BFI Finance Tbk and restore Directors shares in PT Arya Teguharta. Therefore, all forms of transfer of shares carried out without the consent of APT PT Arya Teguharta arising after December 1, 2000 become invalid because obviously the basic transfer of shares is subject to the terms of the mortgage agreement.The Supreme Court decision No.240PK / PDT / 2006 which essentially decided the transfer of shares of APT by PT BFI Finance Indonesia in February 2001 is legally flawed and contrary to the law can be said is a pu-making that is correct according to the law.

Keywords: Stock Pledge Agreement